

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Thomas Sumarsan menyatakan bahwa kas merupakan aset lancar yang paling likuid yang berarti dapat digunakan secara langsung untuk keperluan operasional perusahaan. Kas terdiri dari uang tunai dan saldo rekening koran perusahaan di bank. Uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Saldo perusahaan di bank dapat berupa rekening koran atau tabungan perusahaan di bank. Karena sifat kas yang liquid, maka mudah digelapkan, sehingga diperlukan pengendalian intern untuk mengelolanya, dengan memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan dan pencatatan. Pengendalian intern yang baik terhadap kas, dimana manajemen harus menetapkan tanggung jawab secara jelas dan tiap orang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan padanya. Pengendalian intern yang baik terhadap kas memerlukan prosedur yang memadai untuk melindungi penerimaan kas.

Mahmudi menerangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi bukanlah sesuatu yang baru di dunia bisnis. Akuntansi merupakan suatu istilah dan media komunikasi dalam dunia bisnis atau perusahaan pada umumnya, dan lebih digunakan oleh

manajemen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan setiap hasil pengelolaan usaha yang dipercayakan.

Penerapan otonomi daerah memungkinkan setiap daerah untuk menjadi lebih aktif dan mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus memiliki pengendalian untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangatlah penting. Hal ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada kepala SKPD. Pemahaman tersebut harus disepakati, bahwa SPIP itu termasuk tanggung jawab semua dalam mengelola pemerintahan dan birokrasi secara baik.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nana Sudjana(1992) menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori yaitu: (1) tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, (2) tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan

bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok dan (3) tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi. Memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya. SPIP sendiri pada dasarnya merujuk pada *Commitee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission Or COSO* (2013) yang membagi SPIP ke dalam 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan pemantauan.

B. Perumusan Masalah

Untuk membuat suatu perencanaan riset guna mencapai hasil yang baik dan terarah. Perlu ditetapkan apa yang akan menjadi masalah pokok pada suatu perusahaan tertentu yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada instansi pemerintah?”

C. Tujuan Studi Literatur

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan instansi dalam melaksanakan pengendalian internal terhadap kasnya.

2. Melatih mahasiswa menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, bersikap profesional, dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik.

D. Manfaat Studi Literatur

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang bagaimana sebenarnya penerapan pengendalian intern kas yang diterapkan pada instansi.
2. Sebagai bahan referensi penelitian lainnya, dan sebagai perbandingan dalam kegiatan atau penelitian serupa pada masa yang akan datang.
3. Mahasiswa diharapkan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik nyata operasional di dalam suatu perusahaan

E. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet.. Studi literatur ini berbasis pada metode Meta-Analisis. Review ini berbasis pada teknik Meta-Analisis yang merupakan salah satu upaya merangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif (Sutjipto, 1995). Meta-Analisis dapat dilihat sebagai teknik untuk menganalisis kembali hasil-hasil penelitian yang diolah secara statistik berdasarkan hasil studi primer. Hal yang penting berkaitan dengan studi Meta-Analisis adalah

membantu peneliti dengan mengontruksi teori dengan cara mengumpulkan banyak jurnal dan meringkas hasil jurnal tersebut, setelah itu peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel secara lebih baik dan menyajikan data yang bersifat agregat dari berbagai studi primer tersebut.

